



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARYONO
2. Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU I
3. NHK : 742218

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 734.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/140 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 938 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 59.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO BEBEK MATIC Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO BEBEK Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOTOR, YAMAHA R15 SPORT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000
5. MOTOR, HONDA VARIO BEBEK Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 17.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 219.700.602

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.171.200.602

**III. HUTANG**

Rp. 28.690.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.142.510.602

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.